



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Tingkat 1
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 15 Maret 2023
Waktu	: Pukul 12.30 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Pengantar Ketua Komisi II ; 2. Laporan Panja ; 3. Pendapat akhir Fraksi-fraksi terhadap RUU Perppu tentang Pemilu ; 4. Pengambilan keputusan menerima atau menolak terhadap RUU Perppu tentang Pemilu.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 22 (dua puluh dua) dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri RI; dan C. Menteri Hukum dan HAM RI.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Tingkat 1 ke-2 Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan agenda pengantar Ketua Komisi II, laporan Panja, penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap RUU Perppu tentang Pemilu, dan pengambilan keputusan menerima atau menolak terhadap RUU Perppu tentang Pemilu, pada hari Rabu, 15 Maret 2023, dibuka pukul 12.38 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Tingkat 1 ke-2 Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan agenda pengantar Ketua Komisi II, laporan Panja,

penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap RUU Perppu tentang Pemilu, dan pengambilan keputusan menerima atau menolak terhadap RUU Perppu tentang Pemilu, sebagai berikut:

Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dan Pemerintah, sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
2. Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Kerja Tingkat 1 ke-2 Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan agenda pengantar Ketua Komisi II, laporan Panja, penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap RUU Perppu tentang Pemilu, dan pengambilan keputusan menerima atau menolak terhadap RUU Perppu tentang Pemilu, sebagai berikut:

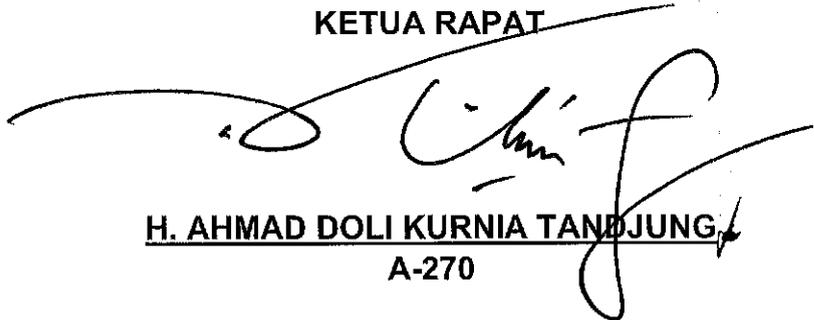
Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah menyetujui dan menandatangani Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.47 WIB.

Jakarta, 15 Maret 2023

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANJUNG

A-270